

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hubungan internasional di abad ke-21 telah mengalami perubahan mendalam dan kompleks yang memengaruhi dinamika global secara signifikan. Di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan tantangan baru seperti perubahan iklim, terorisme, dan pandemi, negara-negara dan aktor non-negara memainkan peran yang semakin penting dalam pembentukan dunia ini.

Abad ke-21 adalah era di mana kerja sama internasional, diplomasi, dan kebijakan luar negeri memiliki peran krusial dalam menanggapi berbagai isu global, sambil menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Dan salah satu sektor yang semakin terintegrasi dalam proses globalisasi dan kepentingan kebijakan luar negeri adalah industri pariwisata.

Pembangunan industri pariwisata yang berorientasi pada sektor Jasa dan industri telah menjadi paradigma unggul dalam pembangunan yang ditempuh oleh berbagai negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan negaranya. Demikian halnya yang sementara berlangsung di Indonesia. Aktivitas sektor pariwisata didukung penuh dan ditanggapi secara positif dan optimis oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya mencari pengganti sektor minyak bumi dan gas yang selama ini menjadi unggulan dalam penerimaan devisa negara. Sektor pariwisata memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan cadangan devisa dan secara pragmatis juga tentu membawa dampak peningkatan yang signifikan bagi pendapatan masyarakat. Situasi dan kondisi nasional yang kini terlihat lebih stabil dan kondusif khususnya dalam bidang politik dan keamanan tentunya akan memberikan rasa percaya dan aman bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.

Secara umum, studi hubungan internasional membahas hubungan antar aktor internasional. Ini mencakup banyak hal, seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan

hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, dan pariwisata. Karena terkait langsung dengan kerja sama dan perdagangan internasional, pariwisata saat ini menjadi bagian integral dari studi hubungan internasional. Dengan menjadi organisasi internasional terbesar di dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Organisasi Pariwisata Internasional (UNWTO) untuk mengakui pentingnya industri pariwisata di tingkat global. Tujuan dari pembentukan UNWTO adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata sebagai sarana untuk pertumbuhan ekonomi, pemahaman internasional, perdamaian, kemakmuran universal, dan hak asasi manusia.

Pariwisata melibatkan aktor negara dan non-negara, dan terkait dengan ekonomi negara, di mana barang, informasi, dan uang dipertukarkan dalam bentuk devisa. Tujuan pariwisata internasional umumnya adalah untuk meningkatkan ekonomi negara, dengan fokus terutama pada tujuan politik, sosial, dan budaya. Dalam konteks hubungan internasional, pariwisata berfungsi sebagai media yang dapat memengaruhi perubahan budaya yang terjadi selama proses pertukaran informasi. Wisata telah berkembang dari hanya hiburan menjadi upaya untuk menunjukkan identitas dan citra suatu negara kepada dunia global.

Pariwisata secara internasional memiliki potensi untuk membantu pembangunan negara maju dan sedang berkembang. Berbicara tentang pariwisata sama dengan berbicara tentang globalisasi, karena pada dasarnya pariwisata dianggap luas dan tidak terbatas. Sebagai salah satu bagian dari globalisasi, pariwisata dianggap sebagai salah satu penggerak utama ekonomi dunia, di mana sektor pariwisata dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Komponen yang berhubungan dengan pariwisata seperti operator wisata, agen perjalanan, restoran, dan lain-lain, sedangkan komponen yang tidak berhubungan dengan pariwisata seperti transportasi, budaya, perbankan, dan layanan lain yang dapat diperlukan untuk mendukung kegiatan perjalanan dan pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi salah satu sarana globalisasi yang menguntungkan yang

menekankan pada daya tarik lokasi dan ciri-cirinya. Pariwisata dapat menjadi subjek diplomasi karena dapat mempengaruhi ekonomi negara. Dengan cara ini, wadah perjanjian dan kesepakatan internasional dapat berkembang secara bertahap. Di mana seorang wisatawan harus mengunjungi kedutaan agar mereka dapat memasuki negara lain, dan pemerintah telah memberikan pilihan kepada duta besar mereka sebagai perwakilan tertinggi, karena duta besar juga memainkan peran penting dalam menyambut wisatawan.

Dengan pertumbuhan pariwisata di berbagai negara, diplomasi ekonomi dan diplomasi pariwisata menjadi hal yang penting. Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab atas pengawasan hubungan ekonomi luar negeri, yang mencakup pengambilan keputusan mengenai negosiasi eksternal dan internal. Kegiatan diplomatik dapat membantu pertumbuhan negara asing. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai penerapan politik internasional untuk mencapai tujuan ekonomi domestik (Faraji Rad, 2004). Pariwisata internasional adalah salah satu jenis pariwisata yang sangat penting yang berkontribusi secara langsung atau tidak langsung pada keputusan Departemen Luar Negeri. Dengan demikian, diplomasi pariwisata dapat didefinisikan sebagai penyebaran, pedoman, dan dukungan untuk hubungan dan wadah industri pariwisata di seluruh dunia. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi secara keseluruhan dan peningkatan kapasitas di bidang industri pariwisata tertentu dianggap sebagai prioritas utama dalam diplomasi internasional, bersama dengan pembangunan, pengembangan, dan pendalaman hubungan geopolitik dengan pasar pariwisata dan negara-negara tetangga dan lainnya di seluruh dunia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah memengaruhi industri pariwisata dalam beberapa aspeknya. Industri sangat penting untuk kemajuan politik, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Keputusan politik pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi pariwisata, sehingga kemajuan diplomasi pariwisata dan implementasinya dapat menghasilkan kedatangan wisatawan dan orang lain. Jadi, diplomasi bertujuan untuk menjaga

kepentingan negara dalam hubungannya dengan negara lain dan untuk membangun hubungan dengan negara-negara di seluruh dunia. Dalam hal ini, suatu negara tetangga juga memainkan peran penting dalam menjaga kemajuan ekonomi, politik, dan keamanan negara, serta dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Indonesia bahkan semua negara di dunia baru saja melewati masa krisis karena adanya Pandemi Covid 19. Ini merupakan masa yang sulit bagi dunia secara global yang mengalami keterpurukan akibat Pandemi Covid 19 ini. Aktivitas warga menjadi serba terbatas yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi karena hampir semua aktivitas kehidupan di dunia terhenti, dan bahkan justru terjadi pelonjakan jumlah angka kematian yang masif dan hampir tidak terkendali. Hampir tidak ada aktivitas pariwisata yang terjadi selama masa itu. Destinasi-destinasi wisata populer di seluruh dunia hanya menjadi sebuah objek kosong tanpa penghuni dengan suasana yang mencekam.

Krisis ekonomi global ini akibat pandemi ini membuat semua negara mencari jalan keluar dari jurang resesi. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa perekonomian ini “Gelap” dikarenakan resesi global yang terjadi adanya Pandemi Covid-19 ini (Fauzan Fikri Firmansyah, 2023). Tapi kemudian, memasuki tahun 2020 aktivitas perekonomian mulai bergeliat kembali, termasuk di Indonesia. Walaupun keadaan belum pulih kembali seperti sedia kala, akan tetapi muncul sebuah pengadaptasian gaya dan pola hidup yang berlaku di masyarakat yaitu “New Normal” atau Kebiasaan Baru; yang diciptakan dan dipublikasikan di seluruh dunia sebagai gaya hidup normal yang baru dengan mewajibkan vaksin, menggunakan masker, selalu membawa antiseptic dan mengurangi kontak langsung untuk mencegah penularan virus Corona.

Dalam pengadaptasian terhadap kondisi di Era Kebiasaan Baru (New Normal) ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengeluarkan sebuah program yang disebut CHSE; Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability yang ditujukan kepada pemilik/pengelola usaha pariwisata dan destinasi pariwisata di seluruh Indonesia untuk diterapkan pada tempat usahanya. Bahkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi seluruh kegiatan sertifikasi

untuk semua industri pariwisata yakni hotel/resort, tempat wisata, restoran dan perkantoran, fasilitas umum, sarana transportasi dan lain-lain agar supaya mengikuti dan menerapkan system CHSE tersebut dengan tujuan utamanya agar setiap pengunjung dan pengguna fasilitas dapat merasa aman dan nyaman saat berkunjung dan terbebas dari resiko penularan virus Corona.

Dengan diterapkannya standarisasi CHSE ini sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia maka setiap aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di semua tempat umum, tempat wisata, dan industri-industri pariwisata terpelihara dengan baik, sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia maupun wisatawan mancanegara yang akan berwisata di Indonesia. (Hendriyani & RI, 3 November 2022).

Seiring dengan bergulirnya penerapan standarisasi dan sertifikasi CHSE di seluruh Indonesia, data menunjukkan pada bulan Juli 2022 kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai lebih dari 470 ribu orang. Angka ini menjadi rekor tertinggi sejak pandemic covid 19. Secara kumulatif kunjungan wisatawan sepanjang semester I, tahun 2022 mencapai 1,2 juta orang. Angka tersebut terbilang baik dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya menyentuh angka 1,6 juta dalam setahun (Airlangga), Desember 2022).

Sejalan dengan program standarisasi dan sertifikasi CHSE, Kemenparekraf juga menyalurkan bantuan hibah kepada seluruh pelaku industri pariwisata di Indonesia. Ada banyak sekali karyawan usaha/industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpaksa harus dirumahkan atas dampak dari pandemi Covid 19 ini. Dan dengan adanya bantuan hibah ini Kememparekraf RI menyalurkan melalui Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia khususnya melalui Dinas Pariwisata di masing-masing Kabupaten/kota untuk mendata dan menyalurkan bantuan hibah kepada pekerja/karyawan yang harus dirumahkan karena dampak Covid 19. Dan upaya-upaya ini membawa dampak yang baik untuk menopang perekonomian para pelaku usaha/industri pariwisata selama masa pandemi.

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menjadi salah satu hasil kerja keras Pemerintah Pusat dan didukung penuh oleh seluruh Pemerintah Daerah dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu isu utama yang diangkat oleh Presiden Jokowi dalam upaya pemulihan ekonomi pada Presidensi G20 – Forum Kerjasama Multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (UE). Terpilihnya Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 memiliki nilai peranan strategis bagi pemulihan ekonomi Indonesia bahkan dunia, dengan mengangkat tema: “*Recover Together, Recover Stronger*”, yang memiliki makna dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, *people centered*, serta ramah lingkungan, dan berkelanjutan (Sugiarto, November 2021).

Berkaitan dengan isu pemulihan ekonomi Indonesia, Presiden Joko Widodo juga melihat bahwa sektor yang sangat terdampak dari penurunan ekonomi di Indonesia yang turut mempengaruhi sektor pariwisata ialah penerbangan/aviasi. Dalam Rapat terbatas (Ratas) mengenai Penggabungan BUMN di sektor Aviasi dan Pariwisata, Presiden Jokowi menekankan 3 hal utama, yakni *Pertama*, bahwa airline hub yang dimiliki Indonesia terlalu banyak dan tidak merata. Dari sekian banyak lalu lintas penerbangan di Indonesia, sebanyak kurang lebih 90 persennya terpusat di empat bandara saja, yakni Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, dan Kualanamu. *Kedua*, harus berani menentukan bandara yang berpotensi menjadi international hub dengan pembagian fungsi sesuai dengan letak geografis dan juga karakteristik wilayahnya. *Ketiga*, agar terjadi sebuah lompatan di sektor pariwisata terhadap pengelolaan ekosistem pariwisata dan pendukungnya, penerbangan betul-betul harus didesain dengan manajemen yang lebih terintegrasi dan terkonsolidasi dari hulu ke hilir, mulai dari manajemen airlines, manajemen bandara, layanan penerbangan yang tersambung dengan manajemen hotel, destinasi dan perjalanan, sampai pada manajemen produk-produk lokal dan industri kreatif yang ada di Indonesia. Dari pertemuan tersebut Presiden Jokowi juga menyebut Bandar udara Sam Ratulangi Bersama 7 bandara lainnya yakni Ngurah Rai Denpasar Bali, Soekarno-Hatta Cengkareng, Kualanamu

Medan, Yogyakarta, Balikpapan, Hasanuddin Makassar, dan Juanda Surabaya saat ini sesuai dengan letak geografis dan karakteristik wilayah sekitarnya berpotensi menjadi bandara hub dan super hub (Setkab, 6 Agustus 2020).

Selain hal-hal diatas, yang perlu juga diperhatikan adalah pentingnya tata kelola hubungan luar negeri dalam menjalin hubungan kerjasama internasional yang melibatkan lembaga negara atau non-negara dalam hal ini maskapai/perusahaan penerbangan maupun lembaga-lembaga lainnya yang terkait yang semuanya berkontribusi atau memberi pengaruh dalam mewujudkan kepentingan nasional (Jemadu, 2023 hal. 169).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur Olly Dondokambey menyambut dengan antusias dan menangkap peluang ini sebagai upaya untuk peningkatan perekonomian daerah Sulawesi Utara melalui sektor pariwisata dengan membuka jalur penerbangan internasional di bandar udara Sam Ratulangi Manado. Usai acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada bulan Februari 2016, Pak Olly Dondokambey langsung bergerak memimpin dengan agenda prioritasnya, yaitu membangun sektor pariwisata daerah dengan membuka konektivitas pasar China melalui jalur penerbangan langsung dari China ke Manado. Dan tidak tanggung-tanggung, hanya selang 4 bulan setelah dilantik, pada bulan Juli 2016 program penerbangan langsung dari beberapa Kota besar di China ke Manado dibuka dan berhasil mendatangkan ribuan wisatawan dari China. Dan tidak itu saja, Pemerintah Sulawesi Utara pun membuka rute penerbangan internasional lainnya, yaitu Rute Manado – Jeju Korea Selatan yang sudah di teken MoUnya pada tanggal 16 September 2022, dan disusul dengan rute yang paling terbarunya yaitu penerbangan langsung Manado ke Narita Jepang dengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia yang dibuka secara resmi pada tanggal 2 Maret 2023.

Dengan adanya aktivitas penerbangan internasional ini perekonomian di Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan angka pertumbuhan yang signifikan. Karena semakin derasnya arus penerbangan internasional ini tentu semakin banyak pula wisatawan mancanegara yang berkunjung di Sulawesi Utara, khususnya di Kota

Manado. Oleh sebab itu beragam aktivitas seperti perbaikan infrastruktur, pembangunan sarana/fasilitas yang mendukung MICE (Meeting, Incentive, Conference & Exhibition) dan pembenahan destinasi-destinasi wisata yang ada di Sulawesi Utara menjadi indikator penting dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara yang menopang sektor pariwisata di daerah.

Namun, seiring dengan gencarnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuka akses penerbangan langsung internasional ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana upaya pemerintah daerah menjalankan peran paradiplomasi dalam merintis penerbangan langsung internasional dan apa saja mekanisme kerjasama yang dilakukan sehingga dapat mengoptimalkan pariwisata daerah agar supaya secara konsisten memberi daya tarik kunjungan wisata di daerah ini serta bagaimana strategi Pemerintah daerah untuk mempertahankan jalur penerbangan langsung internasional yang telah dibuka.

Sebagai mahasiswa pascasarjana yang sedang menggeluti ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pelita Harapan dan juga berprofesi sebagai ASN di Dinas Pariwisata Kota Manado di bidang pengembangan pemasaran pariwisata, penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang peran paradiplomasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam berinovasi dan menjajaki berbagai hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri yang telah berhasil membuka akses penerbangan langsung internasional, mencari strategi yang tepat untuk mempersiapkan rencana yang matang dan koordinasi yang kuat di lintas instansi dan lintas sektoral baik dengan Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta inovasi pengelolaan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang membawa dampak berkelanjutan dalam rangka menopang pembangunan dan perekonomian daerah.

Berdasarkan fakta diatas dan juga minat penulis terhadap fenomena ini, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam Thesis Magister Hubungan Internasional di Universitas Pelita Harapan, dengan Judul Peran

Paradiplomasi dalam Pembangunan Pariwisata Daerah dengan studi kasus Perintisan Penerbangan Internasional di Sulawesi Utara.

I.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada Peran Paradiplomasi Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dalam membuka akses penerbangan langsung internasional yang terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam 2 periode pemerintahannya di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 - 2024.

Dengan menggunakan jalur penerbangan langsung internasional di Sulawesi Utara sebagai studi kasus dalam mengkaji paradiplomasi, penelitian ini menyorot pada pertanyaan berikut:

1. Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagai aktor paradiplomasi sehingga dapat memanfaatkan peluang globalisasi secara langsung untuk pembangunan daerah?
2. Bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengoptimalkan jalur penerbangan internasional sebagai upaya peningkatan pariwisata daerah?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam upaya paradiplomasi, serta bagaimana mencari strategi yang tepat untuk mempersiapkan rencana yang matang, koordinasi yang kuat, dan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan?

I.3. Tujuan Penelitian

Maksud/tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mempelajari dan memahami pentingnya memanfaatkan peluang globalisasi oleh Pemerintah daerah sebagai aktor paradiplomasi melalui mekanisme kerjasama luar negeri dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.
2. Mengidentifikasi proses dan manfaat yang ingin dicapai melalui peran paradiplomasi dengan dibukanya jalur penerbangan internasional.

3. Mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam upaya paradiplomasi, serta mencari strategi yang tepat untuk mempersiapkan rencana yang matang, koordinasi yang kuat, dan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.

I.4. Manfaat/ Kegunaan Penelitian

Manfaat utama dari Penelitian ini adalah memaksimalkan peluang globalisasi dengan cara mewujudkan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah di daerah maupun pemerintah pusat serta berbagai pihak yang terkait sehingga dapat membawa dampak yang berkelanjutan dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan destinasi pariwisata.

Dengan adanya koordinasi lintas instansi dan lintas sektoral menjadi kunci kesuksesan dalam membuka jalur penerbangan internasional sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata daerah antara lain dengan pendekatan yang terkoordinasi, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan utama untuk menarik wisatawan asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, dengan perencanaan dan penyusunan strategi yang baik, banyak kendala dapat diatasi, dan pemerintah daerah dapat berhasil memanfaatkan paradiplomasi untuk memajukan sektor pariwisata daerah.

Harapan besar dari Penulis bahwasanya hasil dari penelitian ini akan memberi sumbangan pemikiran dan ide-ide yang baru dalam membangun strategi yang mapan untuk memanfaatkan peluang globalisasi melalui paradiplomasi dalam meningkatkan pembangunan khususnya sektor pariwisata melalui pembukaan jalur-jalur yang baru yang berpotensi besar untuk mendatangkan jumlah wisatawan mancanegara dalam jumlah yang besar di Sulawesi Utara.

Melalui penelitian dan karya tulis ini Penulis dapat meraih gelar Magister Ilmu Sosial pada Program Studi Magister Hubungan Internasional di Universitas Pelita Harapan Jakarta.

1.5 Kerangka Penulisan

Tesis ini terdiri atas 5 Bab yang membahas bagian-bagian sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan: Bab ini terdiri atas : 1) Latar belakang yang diangkat mengenai proses globalisasi yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi, 2) Fokus Penelitian dan rumusan masalah yang difokuskan pada Peran Paradiplomasi Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dalam membuka akses penerbangan langsung internasional, 3) Maksud dan Tujuan Penelitian untuk mempelajari dan memahami pentingnya memanfaatkan peluang globalisasi oleh Pemerintah daerah sebagai aktor paradiplomasi, mengidentifikasi proses dan manfaat yang ingin dicapai, memahami kendala yang dihadapi, serta mencari strategi yang tepat untuk mengatasinya, 4) Manfaat dan Kegunaan memaksimalkan apa yang menjadi tujuan penelitian, serta 5) Kerangka penulisan yang menjabarkan pokok-pokok bahasan dalam setiap bab.

Bab II Kerangka Berpikir: Bab ini memaparkan beberapa kajian pustaka yang sudah dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi, dan dilanjutkan dengan pemaparan teori yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjawab rumusan masalah dan beberapa konsep utama turunan dari teori yang digunakan untuk mengarahkan pemahaman yang lebih baik dan terintegrasi lagi mengenai topik yang telah dipilih. Tiga tema utama tersebut adalah (i) Globalisasi sebagai interkoneksi antar negara dari sudut pandang Teori Liberalisme, (ii) Paradiplomasi sebagai bentuk globalisasi, dan (iii) Pariwisata sebagai alat paradiplomasi untuk globalisasi pembangunan daerah.

Bab III Metodologi Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan data primer, yaitu wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi dan terlibat secara langsung dalam perintisan penerbangan langsung internasional di Sulawesi utara.

Bab IV Pembahasan: Bab ini membahas Gambaran umum mengenai kondisi geografis Sulawesi Utara yang strategis di bibir pasifik yang menjadikan daerah ini sebagai Hub/ Konektivitas di pasar Asia Pasifik. Peluang ini ditangkap Oleh Gubernur Olly Dondokamney untuk membangun daerah dengan mengangkat pariwisata sebagai program prioritas. Maka sebagai Hub tentu harus didukung oleh fasilitas mulai dari Bandara hingga ke instansi-instansi pendukung lainnya, seperti Custom, Imigration dan Quarantine (Bea cukai, imigrasi dan Karantina). Dalam mewujudkan visi dan misinya, Gubernur sebagai actor sub nasional Pradiplomasi menjalankan perannya mengadakan kerja-sama melalui mekanisme koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dengan jejaring/networking yang kuat Gubernur Olly Dondokambey mampu mewujudkan program utamanya yaitu perintisan penerbangan langsung yang dimulai dari China, kemudian menyusul Jepang dan Korea Selatan.

Bab V Penutup; bab ini terdiri atas Kesimpulan dan saran. Beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain Pemerintah daerah sebagai actor sub negara dalam mengoptimalisasi Pembangunan di daerah dapat menerapkan network governance seperti yang sudah diterapkan Gubernur Olly Dondokambey sampai saat ini. Dan sebagai saran, dalam mengoptimalisasi Pembangunan melalui sektor pariwisata daerah Sulawesi Utara, penulis merekomendasikan konsep sustainable tourism atau pariwisata yang berkelanjutan sehingga kemajuan yang sudah dicapai hingga saat ini masih akan terus terjadi.